

Strategi Percepatan Implementasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Berbasis Smart Village di Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro

Livia Susanty¹, Hani Afifah², Budi Waskito³, Ida Farida⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Bandar Lampung

Email: liviasusanty@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi percepatan implementasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan berbasis *Smart Village* di Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan inovasi pelayanan publik yang efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan digitalisasi pemerintahan desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap lurah, pegawai, serta masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi percepatan implementasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis, sosialisasi digital kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi seperti tanda tangan elektronik dan layanan *WhatsApp Ceria* untuk mempercepat proses administrasi. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital masyarakat, langkah-langkah seperti penguatan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengawasan berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi *Smart Village* di Kelurahan Iring Mulyo ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung transformasi layanan publik berbasis digital.

Kata Kunci: Smart Village, pelayanan publik, inovasi, strategi percepatan.

ABSTRACT

This study aims to analyse the strategy for accelerating the implementation of Smart Village-based population administration document services in Iring Mulyo Village, East Metro District, Metro City. The background of this research stems from the need for innovation in public services that are efficient, transparent, and responsive to the developments in the digitalisation of village governance. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation of the village head, staff, and community members who are directly involved in service delivery. The research results indicate that the implementation acceleration strategy is carried out by increasing the capacity of the apparatus through technical training, digital socialisation to the public, and the utilisation of technology such as electronic signatures and the WhatsApp Ceria service to expedite administrative processes. Despite the remaining challenges of limited infrastructure and low digital literacy among the public, steps such as strengthening cooperation with the Department of Population and Civil Registration and continuous monitoring of budget usage are key supporting factors for the program's success. In conclusion, the successful implementation of Smart Village in Iring Mulyo Village is determined by the readiness of human resources, infrastructure support, and community participation in supporting the digital-based public service transformation.

Keywords: Smart Village, Public Services, Innovation, Acceleration Strategy.

Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan salah satu isu penting dalam kebijakan pembangunan nasional, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Namun, kenyataannya perkembangan desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kesenjangan dengan wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi baru yang mampu mengoptimalkan potensi desa agar dapat mandiri dan berdaya saing.

Salah satu terobosan yang digagas pemerintah adalah penerapan konsep Smart Village atau desa cerdas (Zhang & Zhang, 2020). Konsep ini hadir sebagai pengembangan dari gagasan kota cerdas, dengan penekanan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat desa (Putri et al., 2024). Melalui program ini, desa tidak hanya diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan administrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warganya dengan membuka akses pada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan layanan sosial lainnya (Aryani & Kusumaningrum, 2024).

Pemerintah Provinsi Lampung telah menginisiasi program Smart Village melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan desa berdaya saing di era digital. Salah satu daerah yang menjadi fokus implementasi program ini adalah Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai percontohan desa cerdas. Penerapan sistem berbasis digital ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang sebelumnya lamban karena masih menggunakan metode manual. Kehadiran Smart Village memungkinkan pelayanan dilakukan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan program Smart Village tidak terlepas dari hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta preferensi masyarakat yang masih cenderung memilih layanan konvensional (Hajar & Arma, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan implementasi yang tepat agar program ini dapat berjalan optimal (Halim et al., 2023). Penelitian ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan Smart Village di Kelurahan Iring Mulyo serta merumuskan strategi yang dapat memperkuat efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan.

Tinjauan Pustaka **Pelayanan Publik**

Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku (Busuioc, 2021). Pelayanan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan jasa administratif, tetapi juga mencakup penyediaan barang dan layanan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat (Steccolini, 2018). Dalam konteks administrasi pemerintahan, pelayanan publik menekankan adanya keadilan, keterjangkauan, serta kemudahan akses bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi (Madan & Ashok, 2023). Pelayanan yang baik akan

mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat (Howard et al., 2018).

Lebih lanjut, kualitas pelayanan publik diukur melalui beberapa indikator seperti kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan kejelasan prosedur (van Noordt & Misuraca, 2022). Standar pelayanan yang jelas akan menjadi acuan baik bagi penyelenggara maupun penerima layanan untuk mengetahui proses dan hak yang seharusnya diperoleh (Gesik & Leyer, 2022). Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik memerlukan dukungan dari sumber daya manusia yang profesional, sarana prasarana yang memadai, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mampu menyederhanakan proses birokrasi (Osborne et al., 2021). Dengan adanya pelayanan publik yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin meningkat (Ansell & Miura, 2020).

Smart Village (Desa Digital)

Konsep Smart Village hadir sebagai upaya untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah perdesaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Putri et al., 2024). Melalui digitalisasi layanan, desa dapat memberikan akses yang lebih cepat, mudah, dan efisien kepada masyarakat dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan administrasi kependudukan (Zhang & Zhang, 2020). Smart Village tidak hanya menekankan pada penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana inovasi tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperkuat partisipasi sosial, serta mendukung pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan (Hakim et al., 2023).

Penerapan desa digital menuntut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar implementasi berjalan optimal. Setiap desa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga strategi pengembangan Smart Village perlu disesuaikan dengan kondisi lokal (Suwarjo, 2025). Dengan pemanfaatan teknologi, desa dapat memperluas akses informasi, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, serta membuka peluang usaha baru. Pada akhirnya, Smart Village menjadi solusi pembangunan inklusif yang tidak hanya mengurangi kesenjangan desa-kota, tetapi juga mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Susilowati et al., 2025).

Adopsi Inovasi

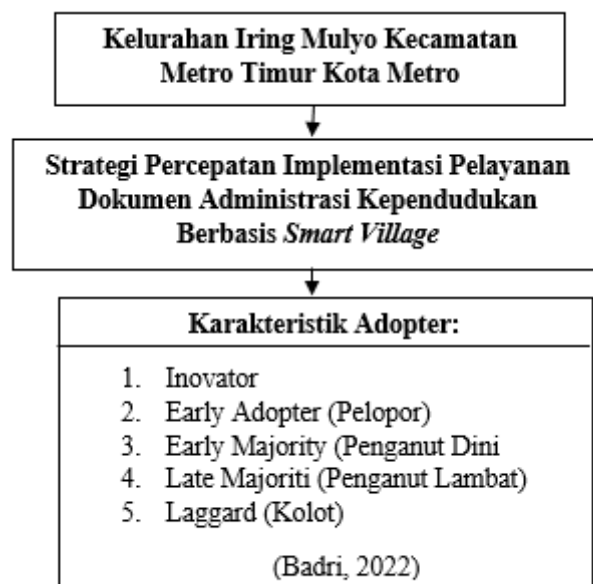
Adopsi inovasi dapat dipahami sebagai proses penerimaan dan penggunaan ide, teknologi, atau metode baru oleh individu maupun kelompok masyarakat (Clohessy & Acton, 2019). (Feng et al., 2022) menjelaskan bahwa adopsi tidak hanya sekadar mengenal suatu inovasi, tetapi juga melalui tahapan pengetahuan, pembentukan sikap, keputusan untuk menerima atau menolak, serta implementasi dan konfirmasi. Dalam konteks pelayanan publik maupun pengembangan desa, adopsi inovasi menjadi penting karena keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh seberapa cepat dan luas masyarakat mau menerapkan pembaruan yang ditawarkan (Aboelmaged & Hashem, 2019).

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat adopsi inovasi meliputi karakteristik individu (usia, pendidikan, pengalaman), kondisi sosial ekonomi, peran agen perubahan, hingga kemudahan akses informasi (Agrawal et al., 2024). Masyarakat yang terbuka terhadap pembaruan cenderung lebih cepat menerima teknologi atau metode baru dibanding mereka yang konservatif. Oleh karena itu, strategi percepatan adopsi inovasi perlu memperhatikan

pendekatan komunikasi yang tepat, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan fasilitas yang mendukung (Usai et al., 2021). Dengan demikian, inovasi tidak hanya hadir sebagai gagasan, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

(Badri, 2022) membagi pengadopsi inovasi menjadi lima kelompok. (1) Inovator adalah pionir yang berani mencoba hal baru dan mendorong orang lain untuk ikut serta. (2) Pengadopsi awal atau pelopor merupakan individu yang lebih cepat menyadari manfaat teknologi dan perubahan. (3) Mayoritas awal adalah kelompok lebih besar yang cenderung pragmatis, menerima inovasi setelah melihat manfaatnya. (4) Mayoritas akhir atau penganut lambat biasanya skeptis dan baru mengadopsi setelah ada bukti nyata dari orang lain. Sementara itu, (5) kolot (laggard) adalah kelompok terakhir yang enggan menerima hal baru karena menganggapnya berisiko tinggi.

Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan yang bersifat empiris. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memperoleh data faktual mengenai penerapan sistem administrasi kependudukan berbasis *smart village* di Desa Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat mengamati langsung proses pelayanan publik serta menilai efektivitas strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam mendukung modernisasi pelayanan kependudukan.

Subjek penelitian terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu lurah, pegawai, dan masyarakat. Lurah dipandang penting karena memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan serta pengawasan administrasi desa. Pegawai menjadi sumber informasi mengenai prosedur, penggunaan teknologi, serta kendala teknis dalam implementasi layanan digital. Sedangkan masyarakat, sebagai penerima layanan, memberikan perspektif mengenai pengalaman, kemudahan akses, dan kualitas pelayanan yang mereka terima. Keterlibatan

berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas *smart village*.

Data penelitian diperoleh melalui 3 teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mencatat aktivitas dan alur kerja pelayanan secara langsung. Wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam dari aparat desa maupun masyarakat terkait persepsi, kendala, dan manfaat program. Sedangkan dokumentasi dipakai sebagai data pendukung, baik berupa arsip, laporan, maupun dokumen resmi yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi percepatan layanan administrasi kependudukan berbasis *smart village*.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Percepatan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Berbasis Smart Village di Kelurahan Iring Mulyo

Kelurahan Iring Mulyo telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mempercepat penerapan *Smart Village* dalam pelayanan administrasi kependudukan. Upaya tersebut meliputi sosialisasi intensif kepada masyarakat melalui berbagai forum seperti pengajian ibu-ibu, Dasawisma, PKK, dan pertemuan pamong desa untuk memperkenalkan manfaat sistem digital. Selain itu, dua petugas telah mengikuti pelatihan di Bandar Lampung pada Mei 2024 guna meningkatkan kemampuan teknis dalam pengoperasian sistem. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan proses administrasi dilakukan secara elektronik tanpa memerlukan tanda tangan basah, sehingga mempercepat layanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui pengiriman dokumen digital lewat *WhatsApp Ceria*.

Meskipun implementasi *Smart Village* menunjukkan kemajuan, masih terdapat tantangan terkait keterbatasan infrastruktur dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital. Beberapa warga masih lebih memilih layanan *offline* karena menganggap sistem baru cukup rumit. Untuk mengatasi hal ini, Kelurahan Iring Mulyo terus melakukan sosialisasi, memberikan bimbingan teknis, serta memperkuat kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro guna memastikan integrasi data dan keberlanjutan sistem. Melalui strategi ini, diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat dan proses administrasi menjadi lebih efisien serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Strategi Percepatan Implementasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Berbasis Smart Village di Kelurahan Iring Mulyo

Kelurahan Iring Mulyo memperlihatkan karakteristik inovator sebagaimana dijelaskan oleh Rogers (1983), yaitu keberanian dalam mengambil risiko serta kesiapan menghadapi ketidakpastian dalam penerapan teknologi baru. Implementasi sistem *Smart Village* menjadi bukti nyata keberanian tersebut. Meskipun sistem ini belum sepenuhnya terbukti di tingkat masyarakat umum, pemerintah kelurahan telah melakukan sosialisasi, pelatihan teknis, dan pengiriman petugas untuk mengikuti bimbingan di Bandar Lampung. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perubahan, meski dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan resistensi masyarakat terhadap inovasi.

Selain keberanian mengambil risiko, Kelurahan Iring Mulyo juga menunjukkan kesiapan dari aspek finansial. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, adanya alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengadaan teknologi menunjukkan adanya perencanaan keuangan yang mendukung inovasi ini. Penggunaan dana tersebut menandakan adanya komitmen jangka

panjang untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan *Smart Village*. Namun, agar keberlanjutan sistem ini terjaga, diperlukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran agar risiko keuangan dapat diminimalisasi.

Dari sisi teknis, kemampuan sumber daya manusia di Kelurahan Iring Mulyo juga berkembang melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Pemanfaatan fitur seperti tanda tangan digital dan pengolahan dokumen elektronik menjadi bukti penerapan kemampuan teknis yang relevan. Upaya untuk mengedukasi masyarakat dan mengurangi ketidakpastian informasi juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Secara keseluruhan, Kelurahan Iring Mulyo telah menampilkan ciri khas inovator: berani mengambil risiko, memiliki perencanaan keuangan yang baik, menguasai kemampuan teknis, dan proaktif dalam mengelola ketidakpastian. Namun demikian, peningkatan infrastruktur dan pemahaman masyarakat tetap menjadi faktor penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan sistem *Smart Village* di masa mendatang.

Rancangan Strategi

Perancangan strategi menjadi tahapan krusial dalam penelitian ini. Strategi yang dikembangkan berlandaskan hasil survei serta kajian literatur, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik Desa Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Rancangan strategi tersebut meliputi beberapa aspek berikut:

- a. Penerapan Teknologi Smart Village
Pemanfaatan teknologi digital melalui pengembangan aplikasi mobile untuk layanan administrasi, sistem basis data terintegrasi, serta peningkatan infrastruktur jaringan sebagai penunjang utama.
- b. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas
Pelaksanaan program pelatihan bagi aparatur desa dan masyarakat guna meningkatkan kemampuan dalam menggunakan teknologi yang diterapkan.
- c. Kemitraan dengan Berbagai Pemangku Kepentingan
Mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan strategi.
- d. Pemantauan dan Evaluasi
Penyusunan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang terstruktur untuk menilai perkembangan serta efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Keberhasilan penerapan fasilitas administrasi kependudukan berbasis *Smart Village* di Kelurahan Iring Mulyo ditentukan oleh kesiapan dalam berinvestasi pada teknologi baru, kemampuan pengelolaan anggaran, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap sistem digital ini.

Strategi percepatan implementasi dilakukan melalui pelatihan tambahan bagi petugas, penerapan layanan elektronik, serta penggunaan *WhatsApp Ceria* untuk mempercepat proses administrasi. Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan kerja sama dengan Dinas Kependudukan serta pemangku kepentingan lokal turut memperkuat integrasi sistem dan mendukung kelancaran layanan.

Daftar Pustaka

- Aboelmaged, M., & Hashem, G. (2019). Absorptive capacity and green innovation adoption in SMEs: The mediating effects of sustainable organisational capabilities. *Journal of Cleaner Production*, 220, 853–863. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.150>
- Agrawal, R., Agrawal, S., Samadhiya, A., Kumar, A., Luthra, S., & Jain, V. (2024). Adoption of green finance and green innovation for achieving circularity: An exploratory review and future directions. *Geoscience Frontiers*, 15(4), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101669>
- Ansell, C., & Miura, S. (2020). Can the power of platforms be harnessed for governance? *Public Administration*, 98(1), 261–276. <https://doi.org/10.1111/padm.12636>
- Aryani, L., & Kusumaningrum, R. (2024). Improving village information systems for sustainable development in Karawang Regency, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 627–646. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.16303>
- Badri, M. (2022). Komunikasi Inovasi dalam Adaptasi Kebiasaan Baru: Studi Deskriptif pada Pelaku Usaha di Provinsi Riau. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), 1–13. <https://doi.org/10.46937/20202238001>
- Busuioc, M. (2021). Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account. *Public Administration Review*, 81(5), 825–836. <https://doi.org/10.1111/puar.13293>
- Clohessy, T., & Acton, T. (2019). Investigating the influence of organizational factors on blockchain adoption. *Industrial Management & Data Systems*, 119(7), 1457–1491. <https://doi.org/10.1108/IMDS-08-2018-0365>
- Feng, Y., Lai, K., & Zhu, Q. (2022). Green supply chain innovation: Emergence, adoption, and challenges. *International Journal of Production Economics*, 248, 108497. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2022.108497>
- Gesk, T. S., & Leyer, M. (2022). Artificial intelligence in public services: When and why citizens accept its usage. *Government Information Quarterly*, 39(3), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101704>
- Hajar, S., & Arma, N. A. (2024). Co-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 516–538. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15891>
- Hakim, L., Imron Rosadi, M., & Prianto, A. (2023). Implementation of Integrated Smart System Platform in Improving the Quality of Public Services through Smart Village In Pucangsari Village, Pasuruan Regency. *Soeropati: Journal of Community Service*, 6(1), 100–114. <https://doi.org/10.35891/js.v6i1.4499>
- Halim, D. K., Pramesti, D. S., & Permatasari, D. N. C. (2023). E-administration for collaborative governance body of green tourism villages in realizing smart villages in Bali.

- IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1263(1), 1–12. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1263/1/012017>
- Howard, P. N., Woolley, S., & Calo, R. (2018). Algorithms, bots, and political communication in the US 2016 election: The challenge of automated political communication for election law and administration. *Journal of Information Technology & Politics*, 15(2), 81–93. <https://doi.org/10.1080/19331681.2018.1448735>
- Madan, R., & Ashok, M. (2023). AI adoption and diffusion in public administration: A systematic literature review and future research agenda. *Government Information Quarterly*, 40(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101774>
- Osborne, S. P., Nasi, G., & Powell, M. (2021). Beyond co-production: Value creation and public services. *Public Administration*, 99(4), 641–657. <https://doi.org/10.1111/padm.12718>
- Putri, A., Rahayu, D., & Dwisnu, E. (2024). Smart Village Program: Challenges Of Implementation In Digitalization Era. *Jurnal Governansi*, 10(1), 41–54. <https://doi.org/10.30997/jgs.v10i1.11565>
- Steccolini, I. (2018). Accounting and the post-new public management. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(1), 255–279. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2018-3423>
- Susilowati, A. P. E., Rachmawati, R., & Rijanta, R. (2025). Smart village concept in Indonesia: ICT as determining factor. *Heliyon*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41657>
- Suwarjo, S. (2025). Smart Village: An Effort to Implement District Digitalization to Support Public Services in Pleret Kapanewon Pleret District Bantul District. *POPULIKA*, 13(1), 14–21. <https://doi.org/10.37631/populika.v13i1.1661>
- Usai, A., Fiano, F., Messeni Petruzzelli, A., Paoloni, P., Farina Briamonte, M., & Orlando, B. (2021). Unveiling the impact of the adoption of digital technologies on firms' innovation performance. *Journal of Business Research*, 133, 327–336. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.035>
- van Noordt, C., & Misuraca, G. (2022). Artificial intelligence for the public sector: results of landscaping the use of AI in government across the European Union. *Government Information Quarterly*, 39(3), 101714. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101714>
- Zhang, X., & Zhang, Z. (2020). How do smart villages become a way to achieve sustainable development in rural areas? Smart village planning and practices in China. *Sustainability (Switzerland)*, 12(24), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su122410510>